

KIC  
Per 89/00  
Yus  
P

**SKRIPSI**

***SRI YULISTIANY***

**PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE**



MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

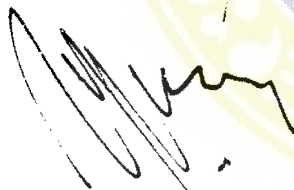
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

# PERJANJIAN JUAL BELI MELALUI E-COMMERCE

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Persyaratan  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pembimbing



**AGUS YUDHA HERNOKO, S.H., M.H.**

NIP. 131 878 393

Penulis



**SRI YULISTIANY**

NIM. 039614284

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

- a. Bahwa hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli dalam jual beli di *e-commerce* menurut kerangka hukum positif di Indonesia tunduk pada pengaturan buku III BW mengenai perikatan. Namun dengan berdasarkan pada asas keterbukaan ( *open system*) yang ada didalam buku III BW, ketentuan tersebut tidak harus dilaksanakan, namun dapat disimpangi berdasarkan kesepakatan yang dibuat sendiri oleh para pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat (1), bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagaimana undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian tidak dapat di tarik kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan bahwa para pihak dalam jual beli di *e-commerce* bebas untuk membuat perjanjian dalam bentuk apa saja dan berisi mengenai apa saja asalkan dilaksanakan dengan itikad baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kebiasaan, dan asas-asas lain yang umum berlaku dalam sebuah perjanjian jual beli
- b. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli yang dirugikan dalam jual beli di *e-commerce* adalah dengan mengajukan tuntutan atau komplain pada penjual melalui *e-mail*, tetapi upaya iini tidak dapat dilakukan pada semua jenis kerugian, karena hanya terbatas pada kerugian karena tidak

sampainya barang yang dipesan oleh pembeli, dan layanan itupun terbatas hanya pada toko virtual tertentu yang memang menyediakan fasilitas pengaduan bagi konsumen, sehingga jalan keluar yang dapat diambil oleh konsumen yang dirugikan secara umum adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi atau gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Walaupun cara ini tidak terlalu efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan terutama pembeli, namun upaya mengingatkan hingga sampai saat ini hukum positif Indonesia belum memberikan pengaturan mengenai jual beli di *e-commerce* termasuk segi perlindungan hukum bagi pembeli, maka perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan karena tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak penjual dapat dilakukan dengan alasan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.

## 2. Saran

- a. Perlu dibentuk suatu perangkat hukum yang mengatur mengenai aktifitas yang ada dalam *e-commerce* sebagai *lex specialis* dari hukum perikatan yang diatur dalam buku III BW, sehingga tidak terjadi kekosongan hukum yang pada akhirnya akan membawa kerugian bukan hanya bagi para pihak namun juga bagi perekonomian negara.
- b. Seiring dengan usaha pemerintah untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh maka, pengaktifan lembaga-lembaga perlindungan bagi konsumen sangat mendesak pelaksanaannya. Mengingat cara-cara pengajuan

gugatan dan membuktikan bahwa dia telah dirugikan.

